



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Persidangan ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Perpustakaan Nasional RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 22 September 2020.
Pukul	: 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Secara Fisik dan Virtual) Menggunakan Media Zoom
Pimpinan Rapat	: Dr.Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Penyesuaian RKA K/L TA 2021 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI
Hadir Komisi X DPR RI	: 32 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Drs. Mohammad Syarif Bando, MM. (Kepala Perpustakaan RI) beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 9.15 WIB oleh Dr.Abdul Fikri Faqih,MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan dari Anggota Badan Anggaran DPR RI dan Kepala Perpustakaan RI, serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/11022/DPR RI/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Perpustakaan RI pada APBN TA 2021 sebesar **Rp.675.539.800.000** (*Enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Per Unit Utama

No	Unit Eselon 1	Pagu Definitif
1	Sekretaris Utama	210.201.033.000
2	Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi	116.965.731.000
3	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan *)	273.850.487.000
4	Unit Kerja Yang Langsung Bertanggungjawab ke Kepala Perpustakaan	74.522.549.000
	Jumlah	675.539.800.000

*) dekonsentrasi masuk Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan sebesar Rp16.227.500.000

Pagu Anggaran Per Program

(dalam ribuan rupiah)

	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		Jumlah
		Operasional	Non Operasional	Operasional	Non Operasional	
Program Perpustakaan dan Literasi	0	0	371,107,678	0	74,694,702	445,802,380
Program Dukungan Manajemen	131,528,833	59,642,374	34,091,179	0	4,475,034	229,737,420
Total	131,528,833	59,642,374	405,198,857	0	79,169,736	675,539,800

- Komisi X DPR RI dan Perpustakaan RI sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah, akan memperhatikan saran, pandangan dan usulan anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan RAPBN TA 2021 yang telah dilakukan.
- Mendorong Perpustakaan RI untuk bekerja sama dengan Kemenparekraf RI terkait pemanfaatan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta sebagai bagian dari paket wisata edukasi di daerah.
- Komisi X DPR RI akan terus mendesak Perpustakaan RI untuk membuat perencanaan guna peningkatan anggarannya untuk diajukan kepada Pemerintah Cq. Bappenas dan Kemenkeu RI pada tahun-tahun mendatang, serta menugaskan Badan Anggaran dari Komisi X DPR RI untuk memperjuangkannya.
- Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk memperkuat kolaborasi dengan K/L lain terutama Kemendes RI, Kemenkominfo RI, dan Kemendikbud RI, menjadi bagian dari strategi kebijakan Perpustakaan RI ke depan.
- Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI sebagai pusat data dan informasi yang terkurasi dan terverifikasi terkait pandemi Covid-19 yang dapat digunakan untuk kajian dan penelitian.

7. Dalam rangka pengawasan dan berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI mendesak Perpusnas RI untuk menyerahkan kepada Komisi X DPR RI, bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2021 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.15 WIB

KEPALA PERPUSNAS RI



Mohammad Syarif Bando

KETUA RAPAT,



Dr. Abdul Fikri Faqih, MM